

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini industrialisasi berkembang sangat pesat. Disisi lain, isu lingkungan menjadi isu yang penting sebagai dampaknya. Hal ini dikarenakan dalam sebuah proses industri selain produk yang dihasilkan, lingkungan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Seringkali proses industri menimbulkan dampak buruk seperti limbah, pencemaran udara dan air, serta penurunan kualitas kehidupan lainnya yang mungkin saja dapat meluas di berbagai bidang. Dalam beberapa kasus berskala nasional dan internasional dampak negatif dari industrialisasi tersebut dapat berupa pemanasan global, radiasi, serta munculnya berbagai penyakit mematikan akibat infeksi bahan kimia dari industrialiasasi. Dalam istilah lain hal ini dikenal dengan *negative externalitie* (Hadi, 2011: v).

Isu lingkungan mengenai dampak negatif dari proses industri ini mulai mendapat respon dari masyarakat dan pemerintah. Hal itu ditandai dengan adanya gerakan peduli lingkungan, lembaga pemerhati lingkungan dan pembuatan undang-undang perlindungan lingkungan oleh pemerintah. Baik industri maupun entitas organisasi lainnya mau tidak mau harus mulai merespon secara proaktif usaha pelestarian lingkungan ini untuk proses keberlangsungan jangka pajang (*sustainability*), bukan hanya terus terpaku pada usaha memaksimalkan laba, namun manajemen juga harus memiliki

tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai bentuk nyata dari usaha pencapaian pemenuhan kebutuhan masa sekarang dengan tidak membahayakan generasi masa yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya. Dari sinilah akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri , sehingga lahir istilah *green accounting* atau akuntansi lingkungan (*environmental accounting*)

Istilah mengenai *green accounting* ini semakin populer seiring dengan semakin banyaknya penelitian bertemakan lingkungan yang dilakukan di Indonesia. Peran utama *green accounting* adalah untuk mengatasi masalah lingkungan sosial, serta memiliki dampak pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan di negara manapun, yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, *green accounting* juga digunakan sebagai upaya perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan terhadap tanggung jawab kepada *stakeholder* perusahaan dalam bidang lingkungan.

Penelitian mengenai isu yang terkait *green accounting* mulai muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai penelitian akademik pada area yang lebih luas dari akuntansi sosial (AAA, 1975; Belkaoui, 1984; Gray, 1990; Gray, Bebbington and Walters, 1993). Pada negara maju seperti Eropa dan Jepang isu lingkungan dianggap sangat patut diperhatikan dan mendapat perhatian khusus, sehingga dibuat peraturan yang ketat mengenai lingkungan dan diawasi secara konsisten. Isu lingkungan berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir baik dalam teori maupun praktik. Di Jepang, sebagai bentuk

nyata akan hal ini, mengeluarkan panduan khusus mengenai akuntansi lingkungan pada tahun 2000 melalui *The Environmental Agency* atau Badan Lingkungan Hidup yang mewajibkan seluruh perusahaan negara untuk menerapkan akuntansi lingkungan. Saat ini, akuntansi lingkungan di Jepang sama pentingnya dengan akuntansi konvensional. Di Indonesia sendiri gerakan lingkungan hidup telah dimulai pada tahun 1960-an. Sebuah tonggak sejarah gerakan ini ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran dalam bulan Mei 1972, sebulan sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm. Tonggak sejarah lain adalah diangkatnya seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1987 sebagai upaya kebijakan resmi dari pemerintah.

Perkembangan akuntansi lingkungan sendiri dimulai sekitar pertengahan tahun 1990 dimana *Internasional Accounting Standards Committee* atau IASC mengembangkan konsep mengenai akuntansi lingkungan dan audit hak asasi manusia. Setelah itu standar industri mengenai akuntansi lingkungan mulai berkembang dan auditor profesional mulai mengeluarkan prinsip-prinsip tentang audit lingkungan.

Di Indonesia pemerintah berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dibuat dengan pertimbangan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam undang-undang ini lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam penelitian Astiti (2015), pengertian akuntansi lingkungan menurut *United States Environment Protection Agency (US-EPA)*, *Green Accounting is identifying and measuring the cost of environmental materials and activities and using this information for environmental management decisions. The purpose is to recognize and seek to mitigate the negative environmental effects of activities and sistem.* Akuntansi lingkungan mengidentifikasi biaya bahan baku lingkungan dan aktivitas serta menggunakan informasi untuk membuat keputusan manajemen lingkungan. Tujuan dari akuntansi lingkungan sendiri adalah untuk mengenali dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan dari aktivitas dan sistem.

Penjelasan lain mengenai *green accounting* diungkapkan Cooper dalam artikelnya, *The introduction of “green accounting”, however well thoughtout, will, under the present phallogocentric system of accounting, do nothing to avert today’s environmental crisis. In fact, it could make matters even worse* (Cooper, 1992, p. 36). Pada praktiknya perusahaan bertanggung jawab kepada *stakeholder* tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi

keuangan saja, tetapi juga perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan lingkungan.

Dalam istilah lain, *green accounting* juga disebut sebagai *environmental accounting*. Menurut Bartolomeo dalam Yakhou And Vernon (2004) “*environmental accounting is an inclusive field of accounting. It provides reports for both internal use, generating environmental information to help make management decisions on pricing, controlling overhead and capital budgeting, and external use, disclosing environmental information of interest to the public and to the financial community. Internal use is better termed environmental management accounting*”. Lingkungan termasuk dalam bidang akuntansi, yang memberikan laporan untuk kedua penggunaan internal, yang menghasilkan informasi lingkungan untuk membantu membuat keputusan manajemen pada *pricing*, pengendalian *overhead* dan penganggaran modal, penggunaan eksternal, mengungkapkan informasi lingkungan yang menarik bagi masyarakat dan komunitas keuangan.

Belkoui dan Ronald (1991) menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan lingkungan sosial, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntansi. Konsekuensi dari wacana akuntansi sosial dan lingkungan ini pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Environmental Accounting* (SEEC) yang sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengertian *Triple Bottom Line*, dimana pelaporan akuntansi ke publik tidak saja mencakup kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya. *Triple-Bottom-Line*

(TBL) accounting is a wide-spread concept for firms wishing to realize broader societal and environmental objectives in addition to increasing shareholder value. TBL accounts routinely cover social, economic and environmental indicators and enable decision-makers to quantify trade-offs between different facets of sustainability (Wiedmann dan Manfred, 2006, page 2). SEEC ini merupakan perluasan wacana dari *Corporate Social Responsibility*.

Konsep TBL menekankan bahwa perusahaan tidak sekadar mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya tetapi juga mengelola permasalahan lingkungan dan penyebab rusaknya. Itulah sebabnya, dalam SEEC dikenal istilah TBL, karena tidak saja melaporkan kinerja ekonomi dan sosial tetapi juga konservasi lingkungan oleh perusahaan harus diungkapkan. Hal ini searah dengan *green accounting* yang bukan saja terpaku pada teori mengenai masalah pencatatan biaya lingkungan dan aktivitas yang dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga adanya implementasi upaya perlindungan lingkungan hidup dan kepedulian lain dalam hal lingkungan untuk kepentingan jangka panjang pihak-pihak yang terkait didalamnya baik itu internal maupun eksternal organisasi. Setelah melakukan penerapan *green accounting*, organisasi diharapkan melakukan penyampaian informasi mengenai upaya perlindungan tersebut pada *stakeholder*.

Green accounting berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dirasa penting dan mulai diimplementasikan oleh industri sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. CSR merupakan bentuk akuntansi lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan. Menurut Hackston dan Milne (1996) CSR didefinisikan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang telah mengatur pelaksanaan CSR dengan menerbitkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, citra perusahaan akan dianggap semakin baik dimata masyarakat apabila dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan eksternal, misalnya apabila ada alokasi dana untuk pengelolaan limbah, pendidikan dan pelatihan, pensiun serta tunjangan lain. CSR adalah mekanisme organisasi yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para *stakeholder* secara sukarela. Hal ini berarti sebelum perusahaan memutuskan akan menerapkan CSR, perusahaan harus mempertimbangkan mengenai dampak negatif dan positifnya terlebih dahulu. Manfaat diselenggarakan CSR untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance*, guna meningkatkan kesejahteraan.

Dalam perguruan tinggi CSR dikenal dalam bentuk *University Social Responsibility* atau *USR*. Dijelaskan dalam penelitian Sari dan Hadiprajitno (2013) definisi *University Social Responsibility* pada dasarnya merupakan suatu kebijakan etis yang mempengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar, dan seluruh karyawan perguruan tinggi melalui manajemen pertanggungjawaban terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan, dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan. Di Indonesia standar akuntansi yang dipakai sebagai acuan belum mewajibkan perguruan tinggi untuk mengungkapkan informasi sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya dalam tanggung jawab Perguruan Tinggi terhadap dampak lingkungan akibat dari kegiatan yang dilakukan. Ketidakwajiban ini yang membuat Perguruan Tinggi harus menilai manfaat dan kerugian sebelum memutuskan akan mengimplementasikan *USR* atau tidak.

Dari asumsi ketidakwajiban tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan atas sejauh mana *green accounting* telah diterapkan pada Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta pada dasarnya telah berupaya menerapkan kondisi Perguruan Tinggi yang ramah lingkungan,

dalam penelitian ini Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta direpresentasikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Contoh upaya penerapan *green accounting* pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan beberapa apresiasi berupa penghargaan dalam upaya penghijauan lingkungan yang telah dilakukan di sekitar Universitas dan tanggung jawab sosial seperti *Green Campus Indonesian Green Award* berturut-turut pada 2012, 2014 dan 2016, *STARS Rated For Excellence Social Responsibility 2015*, Pelestari Energi Terbarukan Indonesia Green Award 2013. Universitas Gadjah Mada juga melakukan upaya *green campus* seperti penyediaan lahan terbuka hijau di lingkungan universitas, bus kampus yang secara konsisten beroperasi sebagai upaya pengurangan polusi dan penyediaan sepeda kampus.

Sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta, Perguruan Tinggi di wilayah Surakarta direpresentasikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret. Dalam aktivitas diluar akademik UMS pada dasarnya berusaha melakukan *green campus*. *Green campus* dilakukan sebagai salah satu upaya pencapaian *green accounting* dimana universitas berusaha melakukan penghijauan di sekitar wilayah kampus. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar karyawan, mahasiswa, dan lainnya merasa nyaman akan kualitas lingkungan yang hijau. Tidak hanya itu UMS telah melakukan berbagai bentuk implementasi dari USR sebagai bentuk penunjang pembelajaran dikampus, beberapa diantaranya adalah adanya lahan Edu-Park sebagai ruang

terbuka hijau yang didedikasikan bukan hanya untuk mahasiswa dan pihak internal universitas tetapi juga untuk masyarakat umum, serta upaya penanaman pohon, selain itu adanya taman di area universitas, mulai disediakan tempat parkir khusus untuk pengguna sepeda, pengadaan tempat sampah yang memadai, kawasan-kawasan anti merokok, serta membuat fasilitas kampus yang ramah lingkungan. Dalam bidang sosial, UMS melakukan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan mendukung secara penuh setiap program dan kegiatan yang diadakan untuk mewujudkan terciptanya peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih baik. Salah satu contohnya antara lain dengan memberikan beasiswa, serta anggaran untuk mahasiswa dan lembaga-lembaga himpunan mahasiswa untuk melaksanakan program penelitian dan pengabdian sosial. Namun hingga saat ini masih ada beberapa kalangan yang mengeluhkan mengenai belum maksimalnya kesadaran tanggung jawab sosial di UMS sendiri, seperti lahan parkir yang dirasa kurang hingga masalah sampah yang terkadang seringkali dibuang sembarangan dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Sementara itu, Perguruan Tinggi lain di Surakarta juga telah berupaya menerapkan *green campus*, yaitu konsep universitas berwawasan lingkungan. Contohnya Universitas Negeri Sebelas Maret mendapatkan apresiasi dalam upaya penerapan kampus hijau ini, UNS menempati urutan kelima *UI Green Matric* untuk kampus ramah lingkungan dan kampus hijau se-Indonesia dan menjadi

salah satu kampus percontohan dalam Perguruan Tinggi berwawasan lingkungan. Penelitian ini menguji apakah ada perbedaan upaya-upaya penerapan *green accounting* yang diterapkan pada Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta dalam sudut pandang akuntansi.

Penelitian ini mereduplikasi penelitian Sari dan Hadiprajitno (2013) yang berjudul Pengawasan Implementasi “Green Accounting” berbasis *University Social Responsibilities* (USR) di Universitas Semarang Serta Studi Komparasi Universitas Se-Kota Semarang. Dalam penelitian Teoh dan Thong (1986) dalam Yousef (2003) bahwa suatu organisasi dapat dikategorikan ikut andil dalam menjaga lingkungan hidup jika memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup (*Environmental awareness*) itu sendiri, yang selanjutnya diikuti dengan keterlibatan organisasi tersebut terhadap permasalahan lingkungan (*Environmental Involvement*). Hal ini perlu diikuti dengan pelaporan lingkungan (*Environmental Reporting*), terutama kinerja organisasi dalam mengatasi dampak kegiatan organisasi terhadap lingkungan, yang kemudian disempurnakan dengan kegiatan audit lingkungan (*Environmental Auditing*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan setidaknya diperlukan empat faktor dalam hal tanggungjawab organisasi terhadap lingkungan adalah kepedulian lingkungan, keterlibatan lingkungan, laporan lingkungan, dan audit lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* BERBASIS *UNIVERSITY*”**

SOCIAL RESPONSIBILITY (USR) STUDI KOMPARASI PADA PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH YOGYAKARTA DAN SURAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat perbedaan perhatian lingkungan (*environmental awareness*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta?
2. Apakah terdapat perbedaan tanggung jawab dan keterlibatan lingkungan (*environmental responsibility*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta?
3. Apakah terdapat perbedaan pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta?
4. Apakah terdapat perbedaan audit lingkungan (*environmental audit*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah terdapat perbedaan perhatian lingkungan (*environmental awareness*) Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta.

2. Menguji apakah terdapat perbedaan tanggung jawab dan keterlibatan lingkungan (*environmental responsibility*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta.
3. Menguji apakah terdapat perbedaan pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta.
4. Menguji apakah terdapat perbedaan audit lingkungan (*environmental audit*) antara Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta.

D. BATASAN PENELITIAN

Mempertimbangkan ada banyaknya Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta keterbatasan waktu penelitian yang ada, maka peneliti menentukan bahwa penelitian dilaksanakan pada beberapa Perguruan Tinggi saja yang dianggap dapat merepresentasikan penelitian obyek penelitian, meliputi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada untuk Perguruan Tinggi di wilayah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Negeri Sebelas Maret untuk Perguruan Tinggi di wilayah Surakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang relevan bagi perkembangan ilmu dimasa yang akan datang, sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan sebagai bahan masukan untuk Perguruan Tinggi agar lebih meningkatkan perhatian terhadap lingkungan sekitar.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai *green accounting*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini dilakukan secara teratur dari bab per bab yang masing-masing bab dibagi kedalam sub bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan dan mempermudah memahami garis besar penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang yang terdiri dari masalah-masalah yang melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Bab ini juga memaparkan tentang tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori, yaitu Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*), Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*), Teori Institusional (*Institutional Theory*). Kemudian akan dijabarkan juga beberapa penelitian terdahulu,

hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka konseptual dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.